



GUBERNUR: APIP YANG
HANDAL DIPERLUKAN
UNTUK PERANGI KORUPSI



GUBERNUR SUGIANTO SABRAN BERSAMA
WAGUB EDY PRATOWO DAMPINGI
MENSOS TRI RISMAHARINI DALAM
PERTEMUAN PEMADANAN DATA BANTUAN



**GUBERNUR PIMPIN
APEL GELAR PERSONEL DAN
SARPRAS PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR DI KALTENG**

GUBERNUR: KOBARKAN
SEMANGAT ISEN MULANG
PADA PON XX PAPUA
TAHUN 2021

17



**DITERBITKAN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan pada Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Redaktur :

Setya Sri Saryanta, Noriko Yunanto

Penyedia Bahan :

Rani Diah Anggraini

Staf Redaksi :

Dewi Yulianti, Dina Meitriana,
Winda Paskanova, Renny Patrisia,
Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangkan.

Fotografer :

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

Layout :

Benito Zuares

Operator Komputer :

Kamala Sri Yadikawati Rasan.

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

DAFTAR ISI :

GUBERNUR PIMPIN APEL GELAR PERSONEL DAN SARPRAS PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR DI KALTENG	3
GUBERNUR: APIP YANG HANDAL DIPERLUKAN UNTUK PERANGI KORUPSI	4
HADIRI RAPAT PARIPURNA, WAKIL GUBERNUR EDY PRATOWO SAMPAIKAN PIDATO PENGANTAR GUBERNUR DALAM RANGKA PENYERAHAN PERDA RPJMD TAHUN 2021-2026	5
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA HAMKA HADIRI UPACARA PERINGATAN HARI AGRARIA DAN TATA RUANG	6
WAKILI GUBERNUR, ASISTEN III LIES FAHIMAH HADIRI FORUM KEMITRAAN DAN KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA PROVINSI KALTENG	6
WAKILI GUBERNUR, PJ. SEKDA NURYAKIN LANTIK ANGGOTA KPID KALTENG PERIODE 2021-2024	7
PJ. SEKDA IKUTI RAKOR INTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	8
GUBERNUR SUGIANTO SABRAN BERSAMA WAGUB EDY PRATOWO DAMPINGI MENOS TRI RISMARHARINI DALAM PERTEMUAN PEMADANAN DATA BANTUAN	9
GUBERNUR KALTENG: TANGGAP DARURAT BENCANA, SEGERA SALURKAN BANTUAN	9
GUBERNUR DISTRIBUSIKAN LANGSUNG BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR DI DESA KUALA KUAYAN	10
GUBERNUR KALTENG SUGIANTO SABRAN LUNCURKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR	11
PJ. SEKDA KALTENG CEK KESIAPAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR DI BARITO UTARA DAN MURUNG RAYA	12
MEMPERSIAPKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JANGKA PANJANG, PENTINGNYA PERAN FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH DALAM MENGHADAPI KRISIS PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA	13
WAGUB EDY PRATOWO TINJAU VAKSINASI MASSAL PELAJAR DI KAPUAS	15
WAGUB HADIRI VAKSINASI SERENTAK PESANTREN DAN RUMAH IBADAH	16
GUBERNUR: KOBARKAN SEMANGAT ISEN MULANG PADA PON XX PAPUA TAHUN 2021	17
ASISTEN III LIES FAHIMAH WAKILI PJ. SEKDA IKUTI RAKOR DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PON XX	17
KUNJUNGAN KERJA KE PULANG PISAU, WAKIL GUBERNUR EDY PRATOWO TINJAU VAKSINASI DAN PANEN PADI	18
FOTO-FOTO KEGIATAN PEMPROV. KALTENG	19

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Biro Adminidtrasi Pimpinan Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

Website : <http://biroadpim.kalteng.go.id/>

Facebook : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>

Twitter : http://www.twitter.com/setda_kalteng

Instagram : @sekretariat.daerah.kalteng

email : buletin.isenmulang@gmail.com

GUBERNUR PIMPIN APEL GELAR PERSONEL DAN SARPRAS PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR DI KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran memimpin Apel Gelar Personel dan Sarana Prasarana (Sarpras) Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kalteng, bertempat di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (9/9/2021). Apel tersebut digelar guna mengetahui ketersediaan dan kesiapan personel dan sarana prasarana untuk penanganan banjir di mana sebagian sudah melaksanakan upaya penanganan darurat di lapangan.

S e b a g a i m a n a diketahui, intensitas curah hujan yang meningkat sejak 21 Agustus 2021 telah menyebabkan banjir di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Lamandau, Kotawaringin Barat, Sukamara, Seruan, Kotawaringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Utara, Murung Raya, dan Palangka Raya. Sementara itu, 6 Kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, yaitu Kotawaringin Barat, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruan, Lamandau, dan Gunung Mas. Sedangkan status siaga darurat, ditetapkan oleh Kabupaten Pulang Pisau. Bencana banjir telah menyebabkan 29.855 KK dengan 57.117 jiwa terdampak serta yang terparah di Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruan.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng telah mulai menyalurkan bantuan Sembako kepada masyarakat Kotawaringin Timur dan Katingan mulai Senin (6/9/2021) lalu. Selanjutnya, bantuan akan disalurkan ke Seruan dan Kabupaten lainnya sesuai perkembangan di lapangan. Dukungan Pemprov Kalteng tahap berikutnya akan diwujudkan dalam bentuk makanan siap saji, peningkatan jumlah dapur umum, bantuan Sembako, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Tenaga kesehatan juga telah berada di 3 Kabupaten, yakni Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruan. "Kami sudah tugaskan mereka hingga pasca banjir ditangani. Biasanya pasca banjir ada penyakit, seperti kolera, demam berdarah, dan lain-lain. Jadi, ini harus kita layani dengan baik," ungkap Gubernur.

Khusus untuk Katingan, Gubernur menekankan, di 5 Kecamatan yang parah, akan ditugaskan koordinator lapangan dari pejabat Eselon II Pemprov Kalteng didampingi pejabat dan tim dari masing-masing organisasi



perangkat daerah.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan dan mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna menghindari cluster COVID-19 selama membantu di lapangan. "Biarpun kita membantu, tetapi kita juga harus menjaga diri kita karena kita punya keluarga di rumah dan menjaga orang banyak. Kepada tim yang akan berangkat saya berpesan agar jangan sampai membuat sulit

masyarakat di sana. Mereka sudah dalam keadaan sulit, jadi kita urus diri kita sendiri, justru kita membuka dapur umum untuk membantu mereka," tegas Gubernur.

Di samping itu, Gubernur pun meyakinkan bahwa bantuan yang diberikan secara bertahap ini akan diawasi dan dipantau dengan melibatkan BPK dan BPKP agar tidak berdampak hukum ke depannya. "Kita awasi bersama, jangan ada bantuan yang menumpuk di Kecamatan atau di Desa. Bantuan itu harus dibagikan agar tidak menjadi stok dan ujung-ujungnya menjadi busuk. Saya mohon bantuan kepada TNI/Polri untuk mengawasi bersama-sama," ujar Gubernur.

Apel diikuti oleh sejumlah relawan, organisasi masyarakat, serta anggota TNI/Polri. Tampak hadir pula Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Pj. Sekda Nuryakin, unsur Forkopimda Kalteng, serta kepala perangkat daerah terkait. (dew/ben).



GUBERNUR: APIP YANG HANDAL DIPERLUKAN UNTUK PERANGI KORUPSI

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka Survei Penilaian Integritas (SPI), secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (9/9/2021).

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) yang handal diperlukan untuk memerangi korupsi. "Pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditekankan kepada tindakan preventif tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif," jelas Gubernur.

Lebih lanjut, diuraikan Gubernur, tindakan preventif dapat dilaksanakan APIP melalui pengawasan dalam bentuk audit kinerja, monitoring evaluasi, reviu, konsultasi, sosialisasi, dan asistensi atau bimbingan teknis.

"Adanya mekanisme manajemen yang didukung oleh kepastian hukum akan sangat memungkinkan menciptakan sistem yang dapat mengurangi kesempatan korupsi. Pada akhirnya, faktor penimbul korupsi akan terhambat oleh sistem yang baik," ucap Gubernur.

Gubernur pun berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat memperbaiki sistem pengendalian intern, penyempurnaan metode pelaksanaan kegiatan, dan koreksi secara langsung atas penyimpangan yang dijumpai di lapangan.

Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan pengawasan ini merupakan langkah efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kegiatan konsultasi, sosialisasi, dan asistensi, menurut Gubernur, juga dapat meningkatkan kapasitas obyek pengawasan dalam pelaksanaan tugas, terutama yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi keuangan.

Gubernur menggarisbawahi, niat dan pemberanakan tindakan korupsi akan sangat mempengaruhi penciptaan insan yang berintegritas, baik pada manajemen di tingkat pimpinan, pelaksana, masyarakat luas, maupun APIP sendiri. "Selain sistem yang dibuat, yang penting adalah kita kalau tidak ada niat, pasti tidak akan ada korupsi. Paling tidak, saat acara dengan KPK RI, yang berniat (korupsi) akan hilang niatnya," pungkas Gubernur mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi



Wilayah III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, saat menyampaikan arahan mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan pertemuan dengan para kepala daerah dan jajaran semacam ini, pihaknya sekaligus ingin menyampaikan peringatan. "Saya ingin melalui monitoring dan evaluasi, kita buka apa kendala yang ada. Tapi, kalau ada warning, saya

tidak berikan person to person," jelasnya.

Bahtiar pun menyampaikan apresiasi bahwa di Kalteng belum ada yang menjadi sasaran Operasi Tangkap Tangan (OTT). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa adanya laporan-laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak menutup mata. "Mari berikan contoh yang baik di wilayah masing-masing," imbau Bahtiar.

Ia pun meminta pemerintah daerah memberikan perhatian pada masalah manajemen ASN serta pengadaan barang dan jasa. Sebab, berdasarkan data statistik penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK pada periode tahun 2004-2021, tindak pidana penyuapan berada di peringkat teratas dengan 739 kasus (66%), diikuti tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa sebanyak 236 kasus (21%). Adapun sisanya, merupakan tindak pidana penyalahgunaan anggaran (50 kasus), TPPU (38 kasus), pungutan/pemerasan (26 kasus), perizinan (23 kasus), dan merintangi proses (10 kasus).

Dari keseluruhan kasus pada periode tahun tersebut, sebanyak 148 kasus melibatkan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Bahtiar, untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, celah yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi adalah masalah perizinan, seperti perizinan pembukaan lahan, perkebunan, dan pertambangan, di samping masalah pengadaan barang dan jasa yang juga masih potensial untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

"Saya titip, Pak Gubernur, berikan pengawasan lebih intens kepada kepala daerah. Saya juga tekankan, pengawasan aktif tololong diperkuat. Kalau pengawasan aktif berjalan, siapapun yang akan melakukan penyimpangan, tidak jadi melakukannya," tegas Bahtiar.

Ia menjelaskan, selama ini pengawasan masih dilakukan secara pasif, yakni menunggu laporan masyarakat atau membuat laporan hasil program. Setelah itu, baru dilakukan pengawasan atau reviu.

"Seharusnya, pengawasan dilakukan sebelum, saat, dan setelah program berjalan. Kuncinya, pimpinan di daerah melakukan pengawasan yang intens," kata Bahtiar mengakhiri arahannya.

Saat memberikan tanggapan, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan bahwa Kalteng saat ini memiliki Perda tentang retribusi ilegal karena diakui bahwa tindakan ilegal tersebut sangat merugikan dalam hal pemasukan bagi keuangan daerah.

Gubernur pun menyampaikan komitmennya untuk menegur atau bahkan memberhentikan kepala perangkat daerah termasuk bupati/wali kota yang terindikasi terlibat kasus korupsi. Gubernur meminta KPK dapat memberikan pendampingan, arahan, dan kerja sama dalam hal ini karena mencegah dinilai lebih baik daripada nantinya ditemukan pejabat yang tertangkap OTT.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama kembali memberikan apresiasi atas pernyataan Gubernur Kalteng tersebut. Ia menekankan bahwa dalam masalah perizinan harus diperhatikan 3 hal, yakni perizinan pembukaan lahan,

pengolahan, dan sebagainya memenuhi syarat atau tidak bermasalah; perizinan yang diberikan tidak merugikan daerah; serta tidak ada transaksional pelaku teknis dan pelaku taktis.

Apabila ada kendala dalam urusan perizinan, KPK siap membantu dan mendampingi untuk meminimalisir kebijakan-kebijakan yang merugikan daerah.

Selanjutnya, kegiatan siang hingga sore ini dirangkai dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK Edi Suryanto.

Tampak hadir mendampingi Gubernur di Aula Jayang Tingang dalam kegiatan ini, antara lain Wakil Gubernur Edy Pratowo, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, Plt. Inspektur Saring, Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat, Kepala Dinas Kehutanan Sri Suwanto, Kepala Dinas ESDM Ermal Subhan, serta Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Suharno. Kegiatan ini juga dihadiri secara virtual oleh bupati/wali kota se-Kalteng atau yang mewakili. (ran/dmr).

HADIR RAPAT PARIPURNA, WAKIL GUBERNUR EDY PRATOWO SAMPAIKAN PIDATO PENGANTAR GUBERNUR DALAM RANGKA PENYERAHAN PERDA RPJMD TAHUN 2021-2026

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menghadiri acara Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun 2021 melalui telekonferensi video dari Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Senin (20/9/2021).

Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual ini dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wiyatno. Rapat paripurna mengagendakan penyampaian pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka penyerahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah pada acara tersebut, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan bahwa Raperda RPJMD akan menjadi bahan pembahasan untuk mencapai kesepakatan bersama.

"Raperda RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 tersebut sebagai bahan pembahasan

untuk nantinya bisa mencapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah," ungkap Wakil Gubernur.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Edy Pratowo berharap berbagai persoalan dan isu strategis dapat dipecahkan melalui RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

"RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan dan isu strategis yang berkembang serta menjadi arah dan panduan pembangunan lima tahun ke depan. Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan tetap diprioritaskan pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam arti luas, dengan memperhatikan masalah lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan," katanya.

Wakil Gubernur juga berharap upaya bersama untuk memajukan dan membangun Kalimantan Tengah mendapat ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk penyusunan rancangan akhir Raperda RPJMD 2021-2026.

"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi segala usaha kita bersama, untuk memajukan dan membangun Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai demi terwujudnya Kalteng Makin Berkah," ujar Wakil Gubernur.

Hadir mendampingi Wakil Gubernur, yaitu Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Yuren S. Bahat. (rik/bow).



ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA HAMKA HADIRI UPACARA PERINGATAN HARI AGRARIA DAN TATA RUANG

PALANGKARAYA-BIROADPIM. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Hamka, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) Nasional Tahun 2021 di Halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional Kalteng, pada Jumat (24/9/2021).

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2021 mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional". Tema ini bertujuan melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha serta mendorong investasi.

Saat membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada acara tersebut, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka menyampaikan bahwa sistem pelayanan pertanahan elektronik, yaitu Sistem Pendaftaran Online Loketku dan Aplikasi Permohonan Online, sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan," katanya.

Lebih lanjut, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka berharap momentum peringatan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional dapat menjadi momentum dalam memberikan pelayanan bagi negara dan manfaat bagi banyak orang.

"Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 kali ini, kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi banyak orang," ujarnya.

Tampak hadir pada upacara tersebut, yaitu Kepala Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kalteng Elijas Tjahjadi serta Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalteng Bambang Ari Setiono. (rik/eka).

WAKILI GUBERNUR, ASISTEN III LIES FAHIMAH HADIRI FORUM KEMITRAAN DAN KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA PROVINSI KALTENG

PALANGKARAYA-BIROADPIM. Asisten III Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalteng. Kegiatan dilakukan secara virtual dan tatap muka dari Aula Eka Hapakat, Lantai III, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (6/9/2021).

Saat menyampaikan sambutan Gubernur, Lies Fahimah mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mendukung Program Jaminan Kesehatan sebagai Program Strategis Nasional, mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya di Provinsi Kalteng, mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan, memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi, meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan, serta menjalin kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan.

Disampaikan juga, sasaran Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan,



yakni pemantapan hubungan kemitraan dengan pihak eksternal terkait pembuatan kebijakan dan instansi perwakilan peserta pada tingkat Daerah, pemahaman yang sama atas program-program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Kalteng dan kerja sama yang saling menunjang, serta dukungan dari pihak/instansi terkait untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 sebagai awal penerapan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia atau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Maka dari itu, dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan khususnya di Provinsi Kalteng, Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi pemerintah, manajemen fasilitas kesehatan, dan seluruh stakeholder terkait dalam menunjang program JKN-KIS agar dapat berjalan optimal.

Lies Fahimah juga berharap adanya komitmen yang teguh dari semua pihak untuk memperkuat sinergi dan komitmen serta memberikan jaminan dan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalteng.

Sementara itu Deputi Direksi Wilayah

Kaltimtengselta BPJS Kesehatan Priyo Hadi Susatyo, dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana RPJMN yang telah ditetapkan pada tahun 2024, kepesertaan JKN-KIS bisa mencapai 98%. Terkait kepesertaan, secara nasional, kepesertaan JKN-KIS dibanding jumlah penduduk adalah 82%. Sedangkan secara Kepwil yang membawahi 4 Provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, apabila ditotal maka angka pencapaian kepesertaannya untuk 4 Provinsi tersebut sebesar 87%. Untuk Kalteng, sampai dengan semester I tahun 2021, kepesertaan JKN-KIS sebesar 2.187.382 jiwa atau apabila dipersentasekan dengan jumlah penduduk Kalteng cakupannya adalah 82,87%, kurang lebih dengan rata-rata nasional.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalteng Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Duwel Rawing, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Palangka Raya M. Masrur Ridwan. (may/eka).

WAKILI GUBERNUR, PJ. SEKDA NURYAKIN LANTIK ANGGOTA KPID KALTENG PERIODE 2021-2024

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin, mewakili Gubernur Sugianto Sabran, melantik Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Periode Tahun 2021-2024 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Jumat (3/9/2021) siang.

Sebanyak tujuh anggota KPID Kalteng yang baru dilantik menggantikan empat anggota terdahulu yang telah purna tugas. Ketujuh anggota yang baru, terdiri atas Henoch Rents Katoppo, Eni Artini, At Prayer, Nisa Rahimia, Chris Philip Alessandro, Ilham Busra, dan Ahmad. Adapun keempat anggota lama yang telah selesai masa tugas, terdiri atas Ming Apriady, Rilius Indrawan, Asih Ayu Purwati, dan Raih.

Pengambilan sumpah janji jabatan dilanjutkan dengan sesi penandatanganan berita acara, di mana Asisten III Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah serta Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Herson B. Aden bertindak sebagai saksi. Selain itu, tampak pula mendampingi Pj. Sekda Nuryakin pada pelantikan kali ini, Plt. Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng Agus Siswadi dan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalteng Daan Rismon.

Dalam sambutan yang dibacakan Pj. Sekda Nuryakin, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengingatkan bahwa dinamika penyiaran di Indonesia saat ini tengah berada pada masa transisi atau peralihan dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses perpindahan



sistem penyiaran dari analog ke digital ini harus tuntas selambatnya pada bulan November 2022.

“Pelaksanaan digitalisasi penyiaran ini akan memberi dampak positif setidaknya pada tiga hal, yakni terjadinya efisiensi penggunaan spektrum frekuensi untuk penyiaran, kualitas teknis penyiaran dalam bentuk gambar dan suara yang diterima masyarakat menjadi lebih baik, serta jumlah saluran televisi menjadi semakin banyak dan memungkinkan lebih banyak pilihan siaran televisi termasuk televisi lokal,” urai Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Pj. Sekda Nuryakin.

Lebih lanjut disampaikan Gubernur, KPID memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi tentang digitalisasi penyiaran termasuk menyampaikan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kalteng ke depan. “Selain itu, KPID Kalimantan Tengah diharapkan dapat melakukan penguatan fungsi pengawasan siaran televisi dan radio termasuk penguatan lembaga penyiaran lokal dalam rangka optimalisasi konten siaran lokal sebagai implementasi

sistem stasiun jaringan," Gubernur menambahkan.

Tantangan yang dihadapi KPID sebagai regulator penyiaran ke depan dinilai semakin besar. Untuk itu, Gubernur menegaskan, harus ada sinergi yang dibangun serta dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, maupun organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain, sebagai upaya bersama dalam mewujudkan konten siaran yang sehat dan berkualitas untuk masyarakat.

"Saya juga mengingatkan kepada KPID agar dalam menjalankan kewajiban pengawasan konten siaran juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada lembaga penyiaran sebagai bentuk stimulasi dalam mendorong peningkatan kualitas penyiaran," kata Gubernur seraya berharap KPID dapat mengarahkan lembaga penyiaran untuk berperan serta dalam menyukseskan agenda pembangunan di Provinsi Kalteng.

Anggota KPID Kalteng Periode 2021-2024 terpilih

telah melalui proses seleksi ketat yang memakan waktu cukup lama. Gubernur pun mengucapkan selamat dan berharap para komisioner terpilih ini mampu mengemban amanah dan tanggung jawab yang baru secara jujur, adil, serta penuh integritas. Gubernur juga berharap KPID dapat memberikan literasi media secara lebih massif kepada masyarakat agar di tengah era ledakan informasi ini, masyarakat mampu memilih dan memilih informasi yang baik dan benar.

"Persiapkan diri untuk bekerja secara optimal demi mewujudkan ekspektasi masyarakat dalam hal mendapatkan penyiaran yang sehat, dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, sehingga kondusivitas dan harmonisasi dapat terjaga," pungkas Gubernur dengan tidak lupa pula menyampaikan terima kasih kepada anggota KPID yang lama atas dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran untuk pembangunan Kalteng khususnya di bidang penyiaran. (ran/sop/foto: kominfo kalteng).

PJ. SEKDA IKUTI RAKOR INTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Kamis (09/09/2021) secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur.

Tampak pula hadir dalam Rakor yang digelar oleh Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ini, yaitu Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Darliansjah.

Dipaparkan oleh Anggota Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas Stranas PK) Muhammad Isro bahwa sebagaimana amanat UU Cipta Kerja, sekarang Perda RZWP3K dan RTRWP tidak lagi terpisah.

"Jadi, ini adalah PR besar dan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah di daerah, tapi juga kita di pusat. Kita akan meminta pendapat dari perwakilan masing-masing provinsi untuk menyampaikan progres dan pandangannya seperti apa," katanya.

Lebih lanjut, Muhammad Isro menjelaskan konteks pertemuan Rakor ini berkaitan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Di dalamnya, terdapat 5 Kementerian/Lembaga sebagai Tim Nasional, yaitu Kemenpan RB, Kemendagri, KPK, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Bappenas.

Stranas PK ini setiap 2

tahun mengamanatkan adanya aksi pencegahan korupsi dan sejak tahun 2019 sudah ada aksinya. Untuk aksi tahun 2021-2022, ada 12 aksi yang salah satunya adalah Percepatan Kepastian Perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map) yang mana RZWP3K dan RTRWP merupakan salah satu output-nya.

"Jadi, sampai dengan target tahun 2022, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menyelesaikan integrasi RZWP3K dan RTRWP," ujar Muhammad Isro.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Darliansjah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah membentuk tim satu peta yang saat ini terus bekerja, terutama terkait review target RTRWP, review target RZWP3K, dan menyiapkan materi-materi teknis.

"Kemarin tanggal 6 September 2021, kami juga telah melakukan zoom meeting dengan pemangku kepentingan yang difasilitasi juga oleh KKP dan sudah mendapat pencerahan. Insya Allah target RZWP3K Kalteng tidak ada perubahan," bebernya.

"Kemudian, untuk percepatan, kami juga sudah berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalteng dan sudah dimasukkan di Program Legislasi Daerah (Prolegda)," pungkas Darliansjah. (win/renn/dmr).



GUBERNUR SUGIANTO SABRAN BERSAMA WAGUB EDY PRATOWO DAMPINGI MENOS TRI RISMAHARINI DALAM PERTEMUAN PEMADANAN DATA BANTUAN

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menghadiri pertemuan pemanfaatan data bantuan dari Kementerian Sosial di Hotel Aurila , Kota Palangka Raya pada Kamis (16/9/2021) sore.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan. Mensos meminta Bank Himbara memenuhi hak-hak KPM sebelum pekan ketiga September.

“Saya minta penyaluran Bansos bisa selesai sebelum minggu ketiga September. Kasihan KPM itu, Pak. Tidak ada yang sulit, Pak, kalau kita bersungguh-sungguh,” kata Mensos.

Dalam pertemuan ini, masukan yang diterima Mensos hampir sama dengan pertemuan yang digelar di Kalimantan Selatan. Salah satu masukan yang terungkap adalah proses penyaluran Bansos yang menghadapi tantangan geografis. Kondisi geografis di Kalimantan Tengah kebanyakan berupa lahan gambut, rawa, dan sungai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Mensos meminta Bank Himbara dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

“Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan, Pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan,” kata Mensos.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalteng. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran Bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.



“Tadi, kan, bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi, saya harapkan memang bantuan tidak ditahan,” katanya.

Untuk membuktikan hal tersebut, Mensos minta KPM yang tinggal di lokasi terdekat untuk dijemput dan dihadirkan di lokasi pertemuan. Dalam waktu kurang dari satu jam, dua KPM PKH dapat dihadirkan sesuai arahan Mensos.

Kepada dua ibu-ibu penerima bantuan PKH, Mensos bertanya apakah sudah mendapatkan bantuan. Dan, dijawab bahwa mereka belum mendapatkan bantuan dimaksud. Atas kejadian tersebut, Mensos kembali menegaskan bahwa data penerima bantuan sebenarnya memang ada.

Mensos kemudian memerintahkan kepada petugas untuk menyerahkan kartu dan memberikan kesempatan kepada KPM mencairkan bantuan dengan menggesek kartu ke mesin edc. Ternyata pencairan berhasil dilakukan. Salah satu KPM berhasil mencairkan bantuan senilai Rp 1 Juta.

Hadir dalam pertemuan, di antaranya perwakilan Bank Himbara, perwakilan PT Pos Indonesia, para pejabat Kemensos, Staf Khusus Menteri Don Rozano Sigit, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Ida Oetari, serta para pendamping PKH dan BPNT di Kota Palangka Raya. (rik/eka).

GUBERNUR KALTENG: TANGGAP DARURAT BENCANA, SEGERA SALURKAN BANTUAN

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Banjir dan Covid-19 di Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tinggang, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (8/9/2021).

Dalam arahannya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengungkapkan upaya-upaya penanganan

bencana banjir di wilayah Provinsi Kalteng, di antaranya evakuasi dan penyelamatan masyarakat terdampak, penanganan terhadap masyarakat yang mengungsi (penyediaan tempat mengungsi dan pemenuhan kebutuhannya), pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak (Sembako dan kebutuhan lainnya), bantuan layanan kesehatan, pengaturan lalu lintas pada jalan-jalan yang terdampak banjir, serta upaya

penanganan darurat lainnya.

Gubernur Sugianto Sabran menekankan agar bantuan untuk masyarakat segera disalurkan dan jangan sampai ada penyelewengan bantuan serta penumpukan di gudang. "Bantuan jangan sampai ditumpuk di gudang Kabupaten dan agar pihak aparat dapat turut serta memantau dalam pendistribusianya, sehingga bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat manfaatnya," tegas Gubernur Sugianto Sabran.

Gubernur juga meminta agar anggota Forkopimda sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk terus aktif memantau setiap bantuan yang mengalir, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, supaya benar-benar sampai dan tepat sasaran kepada yang berhak menerima bantuan tersebut.

Dalam Rakor juga dibahas akan dilaksanakannya gelar pasukan untuk melihat potensi dan kemampuan masing-masing sektor dalam penanganan banjir berikut dampaknya pada Kamis (9/9/2021).



Disampaikan pula bahwa saat ini terdapat 11 Kabupaten di Provinsi Kalteng yang terdampak banjir, di antaranya Kabupaten Katingan, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, Seruyan, Kotawaringin Timur, Sukamara, Murung Raya, Lamandau, Gunung Mas, Palangka Raya, dan Barito Utara. Banjir di Kabupaten Katingan kali ini merupakan banjir terbesar dari 11 Kabupaten/Kota.

"Kita mengantisipasi besok pada gelar pasukan yang segera mengirimkan bantuan yang akan kita berangkatkan ke Kabupaten Katingan yang kena banjir besar, dari 13 Kecamatan, ada 10 Kecamatan yang terdampak. Lima Kabupaten yang parah, kemarin saat ditinjau 3 Kecamatan dan sekarang meningkat menjadi 5 Kecamatan," jelas Gubernur.

Gubernur juga menginstruksikan agar memperbanyak makanan siap saji (mie instan, sarden, biskuit, roti, dan sebagainya) untuk penanganan masyarakat yang terkena musibah banjir serta memperbanyak membuka dapur umum.

Turut hadir pada Rakor tersebut, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Pj. Sekda Provinsi Kalteng H. Nuryakin, Kepala Perwakilan BPK Kalteng Agus Priyono, Kepala BPKP Kalteng Muhammad Yusuf Ateh, serta pihak terkait lainnya. (din/eka).

GUBERNUR DISTRIBUSIKAN LANGSUNG BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR DI DESA KUALA KUAYAN



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran meninjau dan secara langsung mendistribusikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir di Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (7/9/2021).

Sebanyak 3000 paket bantuan disiapkan dengan masing-masing paket seberat 10 kg berisi kebutuhan

pokok masyarakat termasuk ibu hamil dan anak-anak, seperti beras, susu, gula, sarden, minyak goreng, teh, kopi, dan multivitamin. Sebagian paket bantuan sudah dibawa dan dibagikan oleh Gubernur dan rombongan, Senin (6/7/2021) malam di beberapa titik. Sedangkan sisanya sebanyak 2850 paket bantuan dibagikan hari ini.

"Biarpun yang terdampak kalau tidak salah 2300-an, tapi yang kita lihat juga masyarakat yang di kiri-kanan. Bukan cuma korban banjir, tapi masyarakat yang tidak mampu yang berhak menerima kita bantu juga," jelas Gubernur seraya menambahkan bahwa bantuan sosial ini seluruhnya dianggarkan dari APBD Provinsi Kalteng.

Gubernur pun menegaskan bahwa bantuan sosial ini harus benar-benar sampai ke masyarakat. "Saya inginkan bantuan ini sampai. Saya tidak ingin bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak sampai ke masyarakat," tegas Gubernur yang pada peninjauan ini ingin memastikan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat layak konsumsi.

Gubernur memerintahkan seluruh jajaran untuk turut mengawasi penyaluran bantuan sosial ini, baik dari segi kualitas Sembako yang diberikan maupun dari ada tidaknya korupsi dalam pendistribusianya.

"Saya sudah minta Pak Kapolda, Pak Kajati untuk memeriksa setiap bantuan yang mengalir dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Intinya, tidak ada korupsi tidak ada potong-memotong. Akan ada sanksi tegas, pidana hukum," Gubernur kembali menegaskan.

Selanjutnya, kepada masyarakat, Gubernur mengimbau agar berhati-hati di saat musim penghujan tiba dan mengawasi anggota keluarga dengan baik apabila di daerahnya terjadi banjir. Untuk para Bupati, Gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi siap memberikan bantuan termasuk bantuan tenaga kesehatan apabila ada kendala dan keterbatasan sarana prasarana dalam penanganan banjir dan pasca banjir.

"Katingan, saya kunjungan besok. Besok bantuan datang, terus hari Kamis saya akan jalan-jalan ke sekitar Katingan," imbuhan Gubernur Sugianto Sabran yang pada kesempatan kali ini didampingi Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Sementara sebelumnya, Gubernur Sugianto Sabran meninjau Posko pengungsian masyarakat terdampak banjir di Desa Banut Kalanaman dan Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Selasa (7/9/2021) dini hari. Pada kesempatan ini, Gubernur juga secara langsung memberikan bantuan Sembako dan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Kalteng serta bantuan pribadi berupa uang tunai.

Gubernur Sugianto berharap bantuan sosial yang telah disiapkan pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak banjir.

Terkait sejumlah jalan yang ikut terendam banjir, Pemerintah Provinsi Kalteng sudah menyiapkan beberapa Posko, rambu-rambu peringatan, dan alat berat. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng Shalahuddin, dana perbaikan jalan juga telah disiapkan, di mana setelah air surut, maka jalan-jalan yang mengalami kerusakan akan segera diperbaiki. Masyarakat pun diingatkan untuk berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu peringatan saat akan melintas di ruas jalan yang terendam banjir. Masyarakat juga dianjurkan untuk mengambil jalan alternatif lain apabila jalan terdampak banjir terlalu tinggi. (ran/eka/foto: kominfo kalteng).



GUBERNUR KALTENG SUGIANTO SABRAN LUNCURKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran meluncurkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK), Kota Palangka Raya pada Senin (6/9/2021).

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalteng, banjir terjadi di sejumlah Kabupaten/Kota. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan 11 Kabupaten/Kota dilanda banjir. Banjir merendam rumah dan infrastruktur jalan, sehingga masyarakat terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah Provinsi Kalteng terus mengupayakan penanganan dampak bencana banjir di Kabupaten/Kota terdampak banjir.

Saat memberikan arahan, Gubernur Sugianto Sabran telah meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana



dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalteng untuk menginventarisasi daerah-daerah terdampak banjir.

"Hari ini, kita menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang kena musibah terdampak banjir, yaitu tadi ada 11 Kabupaten/Kota, ada 49 Kecamatan, dan 250 Desa/Kelurahan. Saya sudah perintahkan petakan segera," kata Gubernur Sugianto Sabran.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto Sabran juga menginstruksikan kepada Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalteng Erlin Hardi untuk berkoordinasi menyiapkan langkah strategis dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota dalam menangani bencana banjir.

"Saya minta kepada Kepala BPBPK (Provinsi Kalimantan Tengah) Erlin supaya koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota untuk supaya menyiapkan langkah-langkah strategis," jelas Gubernur saat

menyampaikan arahan.

Selanjutnya, Gubernur menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial tahap awal disalurkan ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupa kebutuhan pokok.

"Pada hari ini, kita akan memberangkatkan awal untuk Kabupaten Kotim, bantuan beras dan Sembako yang lainnya termasuk untuk ibu-ibu hamil dan makanan kecil untuk anak-anak," ungkap Gubernur Sugianto Sabran.

Dalam laporannya, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng Erlin Hardi melaporkan bantuan ini merupakan tahap awal bantuan sosial yang akan didistribusikan.

"Maka pada kesempatan ini akan didistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 3.000 paket bantuan. Bantuan ini merupakan tahap awal dan akan dilanjutkan dengan Kabupaten lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan

perkembangannya," kata Erlin Hardi.

Tampak hadir mendampingi Gubernur, yaitu Wakil Gubernur Edy Pratowo, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksama Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Erlin Hardi, serta Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya. (rik/bow).



PJ. SEKDA KALTENG CEK KESIAPAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR DI BARITO UTARA DAN MURUNG RAYA

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengecek kesiapan pendistribusian bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, bertempat di Halaman Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Minggu (12/9/2021).

Bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk korban banjir di Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya tersebut nantinya akan segera dikirimkan setelah mendapatkan laporan terakhir dari Pemerintah Kabupaten setempat.

Berdasarkan laporan sementara, banjir di Kabupaten Barito Utara yang terjadi mulai tanggal 4 September 2021 telah menyebabkan sebanyak 7 Kecamatan terdampak, yaitu Teweh Baru, Lahei, Teweh Selatan, Montallat, Lahei Barat, Teweh Tengah, dan Gunung Timang, dengan jumlah masyarakat yang terdampak banjir lebih dari 4.082 KK.

Sementara itu, untuk Kabupaten Murung Raya, banjir yang terjadi mulai tanggal 1 September 2021 melanda 5 Kecamatan, yakni Laung Tuhup, Seribu Riam, Permata Intan, Murung, dan Barito Tuhup Raya, dengan jumlah masyarakat yang terdampak sebanyak 1.454 KK.

Sebagaimana arahan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Pj. Sekda Nuryakin menegaskan bahwa Pemprov Kalteng siap membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana banjir yang melanda wilayahnya.

Kegiatan pada hari ini dirangkai pula dengan



penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Kalteng untuk masyarakat terdampak banjir. Bantuan CSR itu secara simbolis diserahkan Direktur Utama Bank Kalteng Yayah Diasmono kepada Pemprov Kalteng yang dalam hal ini diwakili Pj. Sekda Nuryakin.

Tampak pula hadir dalam kegiatan pengecekan kesiapan bantuan ini, antara lain Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Erlin Hardi, Plt. Kepala Dinas Sosial Farid Wajdi, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Aryawan, dan Kepala Biro Umum Lisda Arriyana. (set/ist).

MEMPERSIAPKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JANGKA PANJANG, PENTINGNYA PERAN FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH DALAM MENGHADAPI KRISIS PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara virtual peluncuran TribunKalteng.com dan sekaligus menjadi narasumber webinar yang diselenggarakan oleh Tribun News, melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Senin (27/9/2021) sore.

Acara launching atau peluncuran virtual TribunKalteng.com ini dirangkai dengan webinar bertajuk “Nasib Food Estate di Kalimantan Tengah di Tengah Pandemi Covid-19” yang menghadirkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menjadi salah satu pembicara utama. Pada kesempatan itu, Wagub Kalteng Edy Pratowo hadir melalui konferensi video untuk menjadi salah satu narasumber yang menjelaskan tentang Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional yang sedang dalam proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tampak hadir juga dalam konferensi video ini sejumlah pejabat Pemerintah Pusat lainnya, antara lain dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Kemudian acara ini juga dihadiri secara virtual oleh sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Universitas Palangka Raya, serta stakeholder terkait lainnya.

Acara diawali dengan peluncuran media TribunKalteng.com secara virtual yang diresmikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network Dahlan Dahi yang juga sekaligus meresmikan

acara webinar.

“Semoga TribunKalteng.com bisa menjadi bagian penting dari usaha besar masyarakat dan pemerintah Kalimantan Tengah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Semoga kami bisa memberikan kontribusi yang positif untuk tumbuh bersama-sama masyarakat Kalimantan Tengah. Dengan demikian, saya nyatakan TribunKalteng.com diluncurkan secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus membuka webinar “Food Estate di Tengah Pandemi COVID-19”, ucap CEO Tribun Network Dahlan Dahi.

Sementara itu, dalam sesi webinar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan terkait pentingnya peran bidang pertanian jangka panjang, terlebih dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. “Menghadapi COVID-19 yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya di dunia ini, tidak ada negara yang sangat jago menghadapi COVID. Tetapi, COVID tidak hanya bisa dihadapi dengan vaksin, tidak hanya dihadapi dengan pendekatan kesehatan saja. Ya, selain pendekatan yang terkait dengan protokol kesehatan, vaksinasi, yang paling penting adalah food security. Aman gak makanan rakyat, kita bisa isolasi, kita bisa masuk di bunker dan menutup diri, kita lock (kunci), tetapi makanan tersedia tidak,” jelas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dengan berbagai langkah, telah mendorong upaya sektor pertanian agar bisa terus bekerja secara maksimal. “Petani terus bersemangat dengan upaya-upaya melakukan extraordinary menghadapi berbagai tantangan pertanian, akibatnya adalah pertanian tumbuh 16,4% di tahun 2020, mengontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) 2 kita. Akibatnya, pertanian



dari years to years (tahun ke tahun) tidak pernah turun dan alhamdulillah kita sudah 2 tahun tidak melakukan importasi beras. Ini masuk tahun ketiga. Apakah itu hanya kementerian pertanian, tidak. Terlibatlah gubernur, terlibatlah para bupati, terlibatlah para stakeholder," terang Menteri Pertanian yang juga menyebutkan bahwa Kalimantan Tengah merupakan percontohan utama Food Estate Nasional.

Kemudian, pada kesempatan itu, Wagub Kalteng Edy Pratowo dalam sesi paparan narasumber webinar mengutarakan apresiasi dan menyambut baik pembangunan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah. "Pada prinsipnya, Kalimantan Tengah sangat berterima kasih dengan adanya program (Food Estate) ini karena memang kita ketahui bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ± 153 ribu km² yang luasnya satu setengah kali pulau Jawa dan merupakan pulau terbesar atau terluas di Indonesia kedua ini dengan penduduk yang masih sedikit, di antara dua juta enam ratusan. Tentunya ini sangat berharap sekali aspek pembangunan, aspek kemajuan, dan aspek perekonomian bisa ditingkatkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan, baik itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun dukungan dari Pemerintah Pusat," kata Wagub Edy Pratowo.

Wagub Edy Pratowo menjelaskan bahwa program pembangunan ini juga berasal ketika tahun 2017, saat Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan paparan pada sidang kabinet di Istana Negara di hadapan Presiden Joko Widodo tentang Program Nasional yang ditawarkan di wilayah Kalimantan Tengah. "Karena, kita mengetahui bahwa Kalimantan Tengah ini memang pada dulunya tahun 1995, kita dikenal dengan namanya Program Lahan Gambut Satu Juta Hektar. Namun memang, program pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar ini memang tidak berlanjut, sehingga meninggalkan lahan-lahan yang sudah terbuka, lahan-lahan yang sudah digarap, termasuk dengan adanya penempatan warga transmigrasi, baik dari penduduk kita asli maupun dari wilayah pendatang," beber Wagub Edy Pratowo.

"Nah, oleh karenanya, seiring dengan bertambahnya tahun ke tahun, kondisi-kondisi lahan ini, kan, tentu harus ditingkatkan, harus disentuh kembali. Sayang sekali, lahan yang sudah terbuka ditinggalkan begitu saja atau tidak digarap, terutama dalam rangka untuk peningkatan pertanian dalam sektor pertanian padi dan sektor-sektor lainnya. Karena, tadi disampaikan juga, lahan kita adalah lahan rawa berbeda dengan lahan di Pulau Jawa. Tetapi, di lahan Kalimantan Tengah ini juga memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan padi dalam arti luas juga, termasuk kegiatan tanaman hortikultura, kemudian juga palawija, juga peternakan, dan sebagainya. Tentu kita menyadari bahwa 80% penduduk Kalimantan Tengah ini adalah bergerak di usaha pertanian," lebih lanjut Wagub Edy Pratowo menjelaskan.



Wagub Edy Pratowo mengemukakan, dengan adanya Program Food Estate, diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah dan menjadi peluang besar bagi sumber-sumber lapangan pekerjaan masyarakat sekitar maupun generasi penerus Bumi Tambun Bungai.

"Oleh karenanya, saya kira kehadiran Program Strategi Nasional berupa Food Estate, Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah ini, juga merupakan jawaban keinginan kita semua bahwa satu, adalah menghendaki kita agar masyarakat Kalimantan Tengah ini betul-betul sejahtera, berdikari di bidang perekonomian, khususnya dalam rangka untuk mengelola lahan pertanian. Kedua, pada akhirnya memberikan kesejahteraan dan juga mata pencarian yang lebih baik, khususnya juga untuk membuka peluang usaha bagi lapangan kerja baru," ungkap Wagub Edy Pratowo.

Kemudian, lebih lanjut Wagub Edy Pratowo menjelaskan terkait Food Estate di Kalimantan Tengah selama pandemi COVID-19. "Nah, lalu bagaimana kelanjutan di tengah pandemi, saya kira kita tetap berharap bahwa meskipun pandemi, tetapi kegiatan tetap terus berjalan karena kami lihat juga pembangunan yang dilaksanakan, baik dari Pemerintah Pusat maupun dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini, kita terus bersinergi untuk menyukseskan program ini. Yakin dan percaya saya kira nanti pada saatnya program ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya juga bagi masyarakat Kalimantan Tengah," pungkas Wagub Edy Pratowo.

Selain itu, turut juga menjadi pembicara pada acara webinar tersebut, antara lain mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno, Rektor Universitas Palangka Raya Andrie Elia, Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. (renn).

WAGUB EDY PRATOWO TINJAU VAKSINASI MASSAL PELAJAR DI KAPUAS

DADAHUP, KAPUAS – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi remaja atau pelajar di Kantor Balai Wilayah Sungai II Kementerian PUPR Desa Bentuk Jaya A5, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Sabtu (25/9/2021). Sebanyak 500 dosis vaksin disiapkan dalam vaksinasi massal kali ini.

Tampak sejumlah menjabat mendampingi Wagub dalam kunjungan kerja hari ini, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sunarti, serta Kepala Biro Umum Lisdya Arriyana.

Sementara itu, tampak menyambut kedatangan Wagub dan rombongan di Kantor Balai Wilayah Sungai II Kementerian PUPR Desa Bentuk Jaya A5, antara lain Sekda Kabupaten Kapuas Septedy, Forkopimda setempat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

Dalam sambutannya, Wagub Edy Pratowo menyampaikan bahwa kedatangannya bersama rombongan di Dadahup ini dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi bagi remaja dan anak-anak sekolah di daerah tersebut.

Dikatakan Wagub, vaksinasi terus digencarkan untuk menjadikan masyarakat Kalteng betul-betul memiliki kekebalan tubuh, memiliki herd immunity (kekebalan komunal). "Jadi, dengan cara divaksin inilah salah satunya adalah untuk mencegah agar masyarakat kita tidak mudah terkena virus Corona atau Covid-19. Kalian pasti sudah rindu, kan, untuk sekolah? Nah, bagaimana caranya bisa sekolah, salah satunya (vaksinasi) supaya kita bisa mencegah angka penyebaran virus di Indonesia, di Kalteng, khususnya di Kabupaten Kapuas ini bisa mengecil," jelas Wagub.

Pihaknya bersyukur, berkat kerja sama semua stakeholder, dimana Gubernur sendiri selalu mengingatkan agar masyarakat Kalteng cepat tervaksinasi, capaian

vaksinasinya cepat dilaksanakan. "Memang itu target kita. Kita harapkan bulan Oktober sampai November paling tidak 70% warga Kalteng yang jumlahnya 2 juta lebih itu bisa divaksinasi dengan cepat," harap Wagub Edy Pratowo.

Menurutnya, terkait percepatan vaksinasi bagi masyarakat Kalteng, Gubernur Sugianto Sabran tidak henti-hentinya meminta Pemerintah Pusat agar distribusi vaksin dilakukan secepat dan sesegera mungkin.

Lebih lanjut diterangkan Wagub, untuk mencapai target 70% masyarakat Kalteng tervaksinasi pada Oktober atau November mendatang, vaksinasi per hari setidaknya mencapai 50-52 ribu dosis. Adapun saat ini dari Pemerintah Pusat, vaksin yang ada rata-rata hanya sekitar 10 ribu dosis per hari. "Inilah menjadi kendala. Ya, kita tidak menyalahkan karena kita bergantung distribusi vaksin dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat pun mendapat dari donatur atau pengadaannya dari luar negeri," terang Wagub kemudian.

Pada dasarnya, Wagub berharap agar vaksinasi di Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Kapuas, dapat dilaksanakan segera. Sebab, Kementerian Kesehatan berpatokan pada kecepatan vaksin digunakan untuk kembali mendistribusikan vaksin ke daerah.

Wagub mengingatkan bahwa percepatan vaksinasi Kalteng sempat berada di urutan kedua dari 34 Provinsi di Indonesia. "Ini bagus, tinggal distribusi vaksinnya saja," imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Wagub mengapresiasi cepatnya penurunan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Kapuas. "Kita bersyukur, bahkan Kapuas sudah memasuki pada level 2. Jadi, untuk Kalteng, tidak ada lagi zona merah atau oranye, kita semua sudah masuk ke zona kuning. Tetapi, ingat zona kuning ini dengan anak-anak sudah mulai kegiatan tatap muka harus hati-hati, tetap menjaga Prokes, minimal 3M karena Covid-19 ini muncul akibat adanya droplet. Inilah yg kita jaga. Kemudian juga mendorong 3T," imbau Wagub.

Wagub pun meminta para Kepala Sekolah untuk selalu menjaga, mengawasi, dan mengevaluasi anak-anak sekolah supaya proses belajarnya baik, Prokesnya dijaga, dan melihat kalau ada gejala Covid-19 segera menghentikan proses belajar-mengajar agar tidak muncul kluster sekolah.

Selanjutnya, di hadapan awak media, Wagub menyampaikan pesan bagi seluruh elemen masyarakat Kalteng untuk segera dan secepat mungkin melaksanakan program vaksinasi dalam rangka membentuk herd immunity. "Sehingga dengan



vaksin yang sudah dilaksanakan dengan cepat ini, akan memberikan rasa aman pada masyarakat Kalteng agar kita bisa terhindar dari penyebaran virus Corona," ucap Wagub Edy Pratowo.

Terkait dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kalteng, Wagub menyampaikan bahwa Gubernur telah berkomunikasi dengan Presiden untuk progres percepatan Food Estate, terutama untuk percepatan pembangunan jaringan irigasi supaya proses penanaman padi bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Presiden menggarisbawahi beliau akan berkunjung ke sini setelah kondisi Covid mereda," ungkap Wagub yang menambahkan bahwa angka kasus Covid-19 di Kalteng sudah mulai turun dan tren ini harus terus dijaga.

Wagub berharap, selain dapat ikut menjaga stok pangan nasional, hasil produksi padi Food Estate Kalteng dapat menjadi komoditas ekspor, sehingga kualitasnya harus terjaga dan mampu bersaing, di samping dapat

terjalin kerja sama dengan Bulog atau lembaga pangan lainnya.

Pada peninjauan kali ini, Wagub Edy Pratowo berkesempatan memberikan hadiah sepeda kepada 3 siswa yang berhasil menjawab pertanyaan kuis yang disampaikan orang nomor 2 di Bumi Tambun Bungai tersebut.

Seusai meninjau pelaksanaan vaksinasi, Wagub Edy Pratowo beserta rombongan menuju Saung Ujung Sambung Desa Bentuk Jaya A5, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas untuk meninjau lokasi Food Estate di desa tersebut.

Pada keesokan harinya, Minggu (26/9/2021), Wagub Edy Pratowo dijadwalkan meninjau vaksinasi massal pelajar di SMAN 2 Pandih Batu, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, Wagub juga dijadwalkan melakukan panen padi di lokasi Food Estate Kabupaten Pulang Pisau. (ran/dew/man).

WAGUB HADIRI VAKSINASI SERENTAK PESANTREN DAN RUMAH IBADAH

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri kegiatan Vaksinasi Serentak Pesantren dan Rumah Ibadah Sinergi Polri dan Staf Khusus Presiden RI, Selasa (07/09/2021) di Katedral Santa Maria Palangka Raya. Kegiatan vaksinasi massal ini juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual melalui konferensi video.

Tampak pula hadir, yakni Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Purwo Sudharyanto, Kajati Iman Wijaya, Kepala BNNP Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan, serta sejumlah tokoh agama.

Presiden Joko Widodo sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri ini. "Siang hari ini kita telah melaksanakan vaksinasi serentak di beberapa Pesantren, Gereja, rumah-rumah ibadah," katanya.

"Pak Wagub, saya titip setiap vaksin yang sudah

sampai di Kalteng segera dihabiskan, sehingga kalau kurang langsung minta lagi ke Kementerian Kesehatan agar segera selesai program vaksinasi kita dan penyebaran Covid-19 serta penyebaran varian Delta betul-betul bisa kita hentikan di semua provinsi," ujar Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, dalam laporannya kepada Presiden, Kapolda Kalteng Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa kegiatan vaksinasi di Katedral Santa Maria menargetkan sebanyak 1100 dosis.

"Pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Palangka Raya dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di Katedral Santa Maria (1100 dosis) dan Masjid Darussalam dengan target 2000. Selain itu, kami hari ini juga melaksanakan serentak di 13 Kabupaten lainnya. Jadi, target vaksinasi serentak hari ini di Kalimantan Tengah totalnya 6000 dosis vaksin," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan progres capaian vaksin saat ini di Provinsi Kalteng yang berada di urutan 2 capaian vaksin nasional.

"Jumlah vaksin yang diterima 1.117.600 dosis, realisasi yang telah divaksin 926.248 orang (82,87%)," pungkas Kapolda Dedi Prasetyo.

Kegiatan vaksinasi ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dengan para operator vaksin. Vaksin yang diantaranya dari Pemerintah Provinsi, TNI, Polri, OJK, DPRD, BINDA, serta KKP ini dimanfaatkan untuk kegiatan vaksinasi yang sifatnya massal. Adapun untuk tenaga vaksinator, yaitu dari Nakes Polri, alumni Poltekkes, serta Fakultas Kedokteran UPR. (win/dmr).



GUBERNUR: KOBARKAN SEMANGAT ISEN MULANG PADA PON XX PAPUA TAHUN 2021

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melepas kontingen atlet yang akan ikut serta dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021. Acara berlangsung di Halaman Istana Isen Mulang, Jumat (10/9/2021) sore.

Gubernur Sugianto Sabran berpesan kepada para atlet, sebagai duta Kalteng, agar membawa nama baik Kalteng pada PON XX Papua yang dilaksanakan pada tanggal 2-15 Oktober 2021.

"Harapan saya di beberapa Cabor kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan, juga jaga nama baik Kalteng," ujar Gubernur Sugianto Sabran.

Di hadapan para kontingen, Gubernur memberikan semangat serta dukungan penuh agar para atlet terus disiplin berlatih, menjaga kesehatan, dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengobarkan semangat Isen Mulang, para atlet, pelatih, official, manager, serta official kontingen diharapkan dapat mengharumkan nama Kalteng di kancah nasional.

Ketua KONI Kalteng H. Eddy Raya Samsuri dalam laporannya menyampaikan mengenai kesiapan kontingen Kalteng mengikuti PON XX di Provinsi Papua. KONI Kalteng dalam PON ke XX kali ini mengirimkan 19 cabang olahraga (Cabor) dengan atlet, pelatih, dan official berjumlah 179 orang. Adapun untuk cluster, terdiri dari 4 cluster penyelenggara, yaitu cluster Kota Jayapura yang menggelar Cabor binaraga, softball, baseball, volly pasir, bulu tangkis, dayung, sepak takraw, taekwondo, dan



tinju. Cluster Kabupaten Jayapura, terdiri dari renang, panahan, dan menembak. Cluster Kabupaten Merauke, terdiri dari anggar, bermotor, catur, dan sepakbola putri. Terakhir, cluster Kabupaten Mimika, terdiri dari atletik, panjat tebing, dan billiard.

Semua cabang olahraga tersebut telah melakukan pelatihan daerah dan pelatihan mandiri, serta dari H-4 sebelum keberangkatan menuju Papua masing-masing cabang olahraga melakukan karantina mandiri dan test PCR sebanyak 2 kali sampai dengan sebelum keberangkatan. Tes PCR ini akan bekerja sama dengan Kapolda Kalteng di RS Bhayangkara.

Sebagaimana diketahui, pada PON XIX di Jawa Barat Tahun 2016, dengan perolehan medali 3 emas, 4 perak, dan 4 perunggu, Kalteng berada pada urutan ke-26 nasional. "Harapan kami, PON tahun ini, minimal mempertahankan posisi seperti sebelumnya dan maksimal memperbaiki peringkat dengan semangat serta dukungan dari seluruh masyarakat Kalteng," pungkas Eddy Raya Samsuri.

Hadir secara khusus pada acara tersebut, Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran. Selain itu, hadir pula Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalteng Falery Tuwan, Sekretaris Umum KONI Kalteng Elbadi Fardian, Ketua Harian KONI Kalteng Christian Sancho, serta para atlet PON XX Papua Tahun 2021. (din/eka).

ASISTEN III LIES FAHIMAH WAKILI PJ. SEKDA IKUTI RAKOR DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PON XX

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Asisten III Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah mewakili Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) membahas dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI yang sedianya akan diselenggarakan di Papua tahun ini. Rakor yang digelar oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini diikuti Asisten III secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur, Rabu (1/9/2021).

Rakor dipimpin oleh Sekretaris Ditjen (Sesjen) Bina Keuangan Daerah Komedi dan diikuti oleh para Sekda serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) seluruh Indonesia. Sesjen Komedi menyampaikan tujuan

Rakor ini adalah evaluasi terhadap anggaran dukungan penyelenggaraan PON dan Perpanas. "Kami harapkan ada konfirmasi dan pembaharuan data yang telah masuk pada kami dan persoalan apa yang dihadapi di daerah, sehingga kami bisa melaporkan kondisi di lapangan," ungkapnya.

Acara Rakor diisi dengan laporan masing-masing daerah terkait realisasi anggaran dan persoalan yang masih dihadapi di daerah.

Sesjen Bina Keuangan Daerah Komedi menegaskan realisasi anggaran belanja hibah Provinsi kepada KONI dalam rangka PON XX dan Perpanas XVI ditargetkan dapat 100% pada 15 September 2021. (dew/ben).

KUNJUNGAN KERJA KE PULANG PISAU, WAKIL GUBERNUR EDY PRATOWO TINJAU VAKSINASI DAN PANEN PADI

PANDIH BATU, PULANG PISAU – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau pada Minggu (26/9/2021).

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pulang Pisau, Wakil Gubernur beserta rombongan terbatas melakukan peninjauan vaksinasi Covid-19 yang digelar di SMA Negeri 2 Pandih Batu, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu.

Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Bapak Gubernur terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Kalimantan Tengah.

"Semangat untuk mengikuti vaksinasi dari masyarakat maupun pelajar, tinggi. Jadi, tinggal ketersediaan vaksin saja yang saya kira kita akan berusaha sekuat tenaga bersama Bapak Gubernur. Bapak Gubernur juga berulang kali menyampaikan kepada Pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk mendukung vaksinasi di Kalteng," ujarnya.

Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa vaksinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat terwujudnya kekebalan kelompok.

"Saya kira ini momentum yang sangat baik sekali bagi masyarakat kita, Kalimantan Tengah, untuk bisa mendapatkan vaksin dalam rangka mewujudkan Herd Immunity (kekebalan kelompok), sehingga masyarakat bisa terlindungi dari penyebaran virus Corona itu," ungkapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para peserta vaksinasi di SMA Negeri 2 Pandih Batu melalui sesi tanya jawab. Lima orang siswa yang berhasil mendapatkan hadiah sepeda dari Wakil Gubernur Edy Pratowo setelah



menjawab pertanyaan.

Setelahnya, Wakil Gubernur menuju lokasi panen padi varietas Inpari Nutri Zink di kawasan lumbung pangan nasional (Food Estate), tepatnya Rei 28.

Wakil Gubernur Edy Pratowo mengatakan bahwa nutrisi yang terkandung dalam padi Nutri Zink diharapkan bisa menekan angka stunting pada anak-anak.

"Saya kira ini salah satu varietas unggulan untuk menekan angka stunting yang dimulai dari sumbernya. Dengan nutrisi yang diberikan dari padi Nutri Zink ini bisa membantu anak-anak kita di masa yang akan datang," ungkap Wakil Gubernur.

Turut mendampingi Wakil Gubernur dalam kunjungan kerja di Pulang Pisau, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Kesra Hamka, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sunarti, serta Kepala Biro Umum Lisdya Arriyana. (rik/man).



Wakil Gubernur H. Edy Pratowo meninjau langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2021, bertempat di Gedung Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalteng, Kota Palangka Raya pada Selasa (14/9/2021).



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima bantuan 21 ton oksigen dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diserahkan langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada Wakil Gubernur Edy Pratowo, di Halaman Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Kamis (30/9/2021).



Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri dan sekaligus menjadi saksi pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Kota Sampit pada Senin (6/9/2021).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah



H. EDY PRATOWO
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah



V A K S I N
A M A N & H A L A L

LINDUNGI DIRI DAN KELUARGA
DENGAN VAKSINASI COVID - 19



<http://biroadpim.kalteng.go.id/>



<http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>



http://www.twitter.com/setda_kalteng



@sekretariat.daerah.kalteng



bulletin.isenmulang@gmail.com